



RENCANA AKSI  
**NASIONAL**  
PENGELOLAAN PERIKANAN DI

WPP RI-718

RENCANA AKSI  
**NASIONAL**  
PENGELOLAAN PERIKANAN DI

WPP RI-718



## SAMBUTAN

---

Wilayah Pengelolaan Perikanan-Negara Republik Indonesia 718 (WPP-NRI 718) meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru & Laut Timor Bagian Timur merupakan salah satu daerah penangkapan udang dan ikan demersal yang paling produktif di Indonesia. Komoditas udang dan jenis-jenis ikan demersal telah menjadikan WPP-NRI 718 magnet bagi pengembangan usaha penangkapan sejak 4 dekade terakhir.

Pesatnya peningkatan intensitas penangkapan di WPP-NRI 718 memberikan dampak pada keberlanjutan sumberdaya ikan yang hingga saat ini telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Degradasi stok sumberdaya udang dan ikan demersal, degradasi habitat, kemiskinan nelayan, IUU fishing adalah sebagian dari isu utama perikanan di WPP-NRI 718.

Guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP-NRI 718, Pemerintah melakukan upaya revitalisasi pengelolaan perikanan melalui penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di WPP-NRI 718. Proses penyusunan RPP WPP-NRI 718 telah melalui perjalanan panjang. Tim penyusun yang berasal dari unit kerja terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, perguruan tinggi dan para pakar memperoleh asistensi teknis di University of Rhode Island - USA pada bulan September 2013. Serangkaian workshop yang dihadiri oleh sektor terkait di tingkat nasional maupun lokal serta didukung oleh NOAA Pacific Island Fisheries Science Center, Connecticut University, IMACS dan MPAG telah dilakukan.

Pengelolaan bersama ini diharapkan sebagai wujud laut sebagai pemersatu pulau-pulau yang mencakup provinsi, kabupaten dan kota sebagai bagian dari pengelolaan regional maupun global, sesuai semangat deklarasi Juanda yang menjadi tonggak pemersatu nusantara serta memperkuat hukum kewilayahan Indonesia.

RPP WPP-NRI 718 ini sejatinya bersifat living document, adaptif terhadap perubahan sehingga dapat terus dikembangkan sesuai dengan dinamika perikanan yang ada. Kami menghargai dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan RPP ini sangat kami apresiasi.

Jakarta, Februari 2014

Sharif C. Sutardjo  
Menteri Kelautan dan Perikanan

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	<b>03</b>
A. Visi	04
B. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengelolaan	05
C. Roadmap	05
<b>BAB 2 : ANALISIS SITUASI</b>	<b>06</b>
A. Sumberdaya Ikan	06
B. Ekosistem	10
C. Pemangku Kepentingan	11
D. Sosial dan Ekonomi	11
E. Tatakelola	13
<b>BAB 3 : SATUAN PENGELOLAAN PERIKANAN</b>	<b>14</b>
<b>BAB 4 : ISU PENGELOLAAN</b>	<b>16</b>
A. Isu	16
B. Isu Prioritas	16
<b>BAB 5 : MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>20</b>
A. Maksud	20
B. Tujuan dan Sasaran	22
<b>BAB 6 : INDIKATOR DAN <i>BENCHMARK</i></b>	<b>28</b>
A. Rencana Aksi Tujuan 1	29
B. Rencana Aksi Tujuan 2	32
C. Rencana Aksi Tujuan 3	34
<b>BAB 7 : KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>38</b>
<b>BAB 8 : PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI DAN REVIEW</b>	<b>40</b>
A. Periode Pengelolaan	40
B. Evaluasi dan Review	40
<b>BAB 9 : REKOMENDASI DAN PENUTUP</b>	<b>42</b>
A. Rekomendasi	42
B. Penutup	42



pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan (*responsible fisheries management*). Dari sisi ekonomi, Indonesia telah mengalami kerugian karena kegiatan IUU Fishing di WPP-NRI 718 sekitar Rp. 20 Triliun atau setara dengan USD 2.000.000.000 setiap tahun (ATSEA, 2011).

Article 6.2 *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan (*responsible fisheries management*) harus menjamin kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan sumberdaya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumberdaya ikan di Laut Arafura maka Indonesia harus melakukan upaya terbaik agar Laut Arafura dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya cita-cita nasional tersebut di atas. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga harus melakukan upaya maksimum agar potensi sumberdaya ikan di Laut Arafura tidak menjadi lumbung ikan bagi negara lain baik secara *legal* maupun *illegal*.

Untuk maksud di atas, sudah tiba waktunya bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya ikan di Laut Arafura, membangun kolaborasi dan sinergi yang produktif dalam bingkai **Negara Kesatuan Republik Indonesia** dengan menancangkan pelaksanaan pengelolaan Laut Arafura secara berkelanjutan. Pemerintah juga harus bersatu-padu dengan pelaku industri penangkapan ikan di Laut Arafura untuk memastikan terwujudnya cita-cita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, karena menurut *article* 6.1 CCRF 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang bertanggungjawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan.



## A VISI

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya disebutkan bahwa pengelolaan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Guna mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan, telah ditetapkan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung *Blue Economy* yaitu Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2012). Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) pendekatan yakni (i) pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), (ii) pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), (iii) penyediaan kesempatan kerja (*pro-job*) dan (iv) kelestarian lingkungan (*pro-environment*).

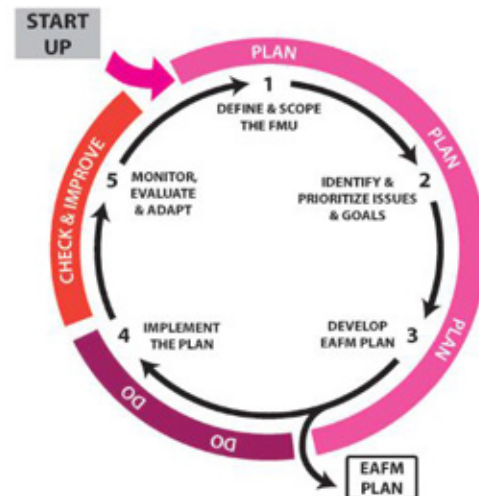
## B RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PENGELOLAAN



**Gambar 1.1**  
Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur (WPP-NRI 718) berdasarkan Permen KP No. 1 Tahun 2009

Rencana Pengelolaan Perikanan di dalam dokumen ini mencakup Wilayah Pengelolaan Perikanan-Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, WPP-NRI 718 mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur yang merupakan bagian dari Paparan Sahul dan secara geografis berbatasan dengan daratan Papua dan Laut Banda di sebelah utara; serta berbatasan langsung dengan 3 (tiga) negara, yaitu Australia di sebelah Selatan, Timor Leste di sebelah Barat, dan Papua Nugini di sebelah Timur. Letak geografis WPP WPP-NRI 718 tersebut seperti pada **Gambar 1.1**

## C ROADMAP



**Gambar 1.2**  
Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan melalui Pendekatan Ekosistem (Sumber: Heenan et al., 2013)

Perencanaan penyusunan rencana pengelolaan perikanan merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, yang setidaknya terdiri dari 5 (lima) tahapan seperti pada **Gambar 1.2** (Heenan *et al.*, 2013 yang juga diadopsi oleh NOAA).

## ANALISIS SITUASI

### A SUMBERDAYA IKAN

Sumberdaya ikan yang terdapat di perairan WPP-NRI 718 ini terdiri dari 5 (lima) kelompok, yaitu:

#### 1. Ikan Pelagis Besar

Ikan pelagis besar yang tertangkap di WPP-NRI 718 antara lain adalah hiu (*Hemigalidae*), tenggiri (*Scomberomorus commersoni*), tongkol (*Euthynnus sp.*), cakalang (*Katsuwonus pelamis*), madidihang (*Thunnus albacares*) dan tuna mata besar (*Thunnus obesus*). Ikan hiu banyak ditangkap di perairan ini karena bagian siripnya yang bernilai ekonomis. Daerah penangkapan ikan pelagis besar adalah perairan Laut Arafuru di sekitar Kepulauan Aru sampai ke perairan Laut Arafuru bagian selatan yang berbatasan langsung dengan perairan Australia.

Mencermati perkembangan biomasa stok ikan pelagis besar serta masih rendahnya upaya penangkapan kelompok ikan ini, nampaknya selama 5 tahun mendatang stok ikan pelagis besar di WPP-NRI 718 masih dalam kondisi baik dan aman. Fenomena ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan prioritas rendah kepada stok ikan pelagis besar dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di perairan WPP-NRI 718.







## 2. Ikan Pelagis Kecil

Ikan pelagis kecil yang tertangkap di WPP-NRI 718 antara lain adalah selar (*Caranx spp.*), layang (*Decapterus ruselli*), tetengkek (*Megalaspis cordyla*), bawal hitam (*Formio niger*), ikan terbang (*Cypselurus spp.*), julung-julung (*Hemirhamphus spp.*), kuwe (*Caranx sexfasciatus*), kembung (*Rastrelliger spp.*), banyar (*Rastrelliger kanagurta*), tembang (*Sardinella fimbriata*) dan ikan biji angka (*Upeneus vittatus*).

Pada tahun 2002 dan 2003 tingkat biomasa stok ikan pelagis kecil di perairan WPP-NRI 718 sangat baik sekali, berada diatas biomasa stok yang dapat menghasilkan tangkapan lestari maksimum. Hal ini nampaknya disebabkan pada periode tersebut jumlah upaya tangkap masih rendah, lebih kecil dari upaya tangkap optimum yaitu upaya tangkap yang menghasilkan tangkapan lestari maksimum. Pada tahun 2004 terjadi penambahan upaya tangkap yang sangat besar. Kondisi ini diduga menyebabkan biomasa stok ikan pelagis kecil menurun drastis, jauh lebih rendah dari biomasa stok yang dapat menghasilkan tangkapan maksimum lestari.

Walaupun jumlah upaya tangkap telah berkurang pada tahun 2005, namun dampak kenaikan biomasa stok ikan tidak terlalu besar, karena tingginya upaya tangkap pada tahun sebelumnya. Dampak positif dapat dilihat pada tahun 2006, biomasa stok ikan telah meningkat menjadi lebih besar dari biomasa stok yang menghasilkan tangkapan lestari maksimum.

Pada tahun 2007 sampai tahun 2011, jumlah upaya tangkap tahunan terhadap ikan pelagis kecil di WPP-NRI 718 ini selalu lebih rendah dari upaya tangkap optimum, sehingga biomasa stok ikan pelagis kecil pada periode tersebut bertahan pada tingkat yang sangat baik yaitu lebih besar dari biomasa stok ikan yang dapat menghasilkan tangkapan lestari maksimum.

Berdasarkan hasil analisis ini direkomendasikan bahwa untuk menjamin keberlanjutan kegiatan perikanan pelagis kecil di WPP-NRI 718 ini, jumlah upaya tangkap hendaklah dipertahankan seperti jumlah upaya tangkap pada periode tahun 2006-2011.

## 3. Ikan Demersal

Ikan demersal yang tertangkap di WPP-NRI 718 antara lain adalah ikan manyung (*Arius spp.*), ikan sebelah (*Psettodes erumei*), kuwe (*Caranx sexfasciatus*), lolosi biru (*Caesio caerulaurea*), bawal putih (*Pampus argenteus*), kakap putih (*Lates carcarifer*), lencam (*Lethrinus spp.*), kuniran (*Upeneus sulphureus*), kakap merah (*Lutjanus sp.*), dan layur (*Trichiurus spp.*). Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal ini pada periode tahun 2007-2011 dapat diketahui bahwa peningkatan bobot hasil tangkapan sampai tahun 2010 diikuti penurunan bobot tangkapan pada tahun 2011.

Fenomena ini nampaknya akibat tingginya permintaan pasar yang mengakibatkan peningkatan kegiatan penangkapan. Turunnya bobot tangkapan pada tahun 2011 mengindikasikan menurunnya biomasa stok ikan demersal akibat upaya tangkap yang terlalu tinggi. ( $Existing\ Biomass$ )/( $Biomass\ at\ MSY$ )

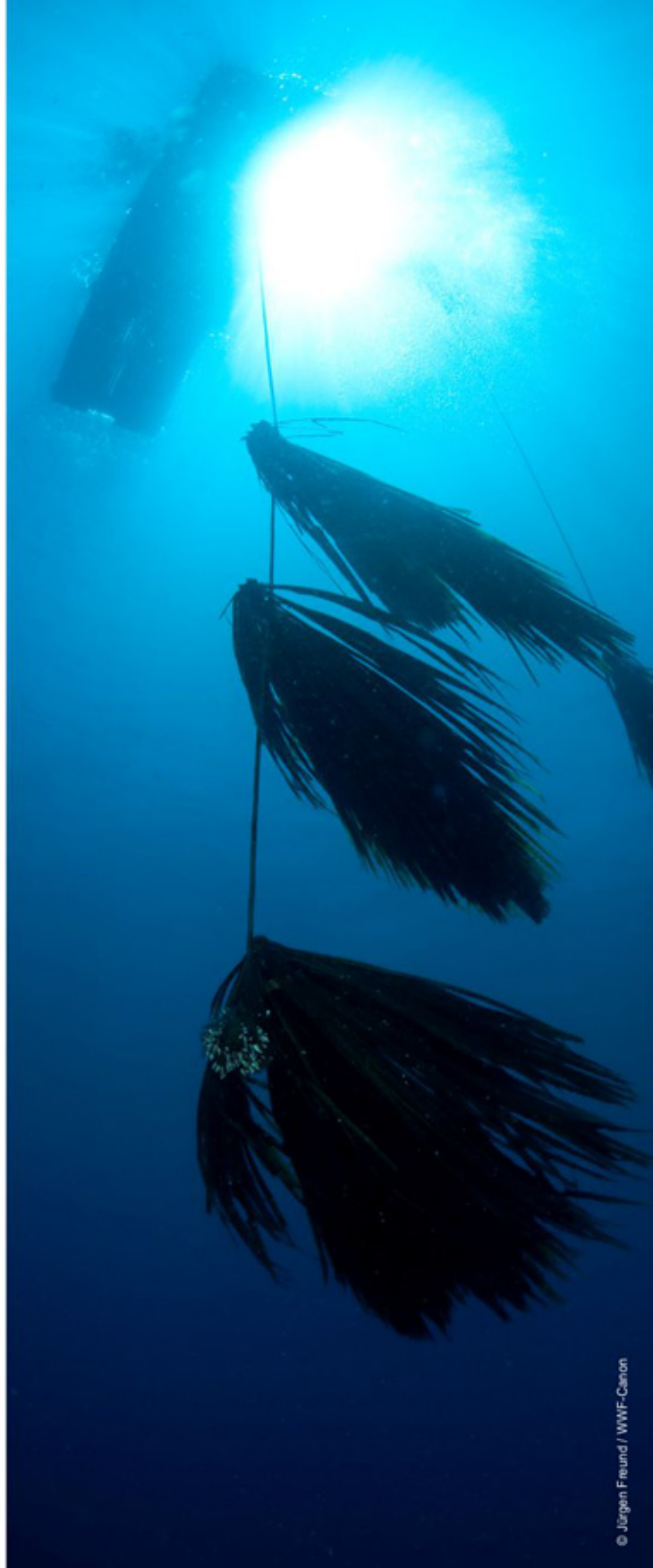
Berdasarkan hubungan antara jumlah upaya tangkap dan tangkapan per satuan upaya tangkap serta hubungan antara upaya tangkap dan total tangkapan ikan demersal dapat diketahui Tangkapan Lestari Maksimum (TLM) dan Upaya Tangkap Optimum (UTO) perikanan demersal di WPP-NRI 718 berturut-turut adalah 539.100 ton per tahun dan 903 unit kapal pukat ikan (Purwanto, 2013).

#### 4. Ikan Karang

Ikan karang yang tertangkap di Perairan WPP-NRI 718 antara lain adalah ikan ekor kuning (*Caesio cuning*), ikan napoleon (*Cheilinus undulatus*), kerapu (*Epinephelus spp.*) dan beronang (*Siganus spp.*). Perkembangan hasil tangkapan ikan karang ini pada periode tahun 2007-2011 dapat diketahui adanya peningkatan bobot hasil tangkapan sampai tahun 2011. Kecenderungan peningkatan bobot tangkapan biomasa stok ikan demersal ini mengindikasikan masih terbuka peluang untuk meningkatkan aktivitas penangkapan ikan karang di WPP-NRI 718.

#### 5. Udang

Hasil tangkapan utama dari perikanan udang di Perairan WPP-NRI 718 antara lain adalah udang jerbung (*Penaeus merguensis*) dan udang monodon (*P. monodon*). Hubungan antara jumlah upaya tangkap dan tangkapan per satuan upaya tangkap serta berdasarkan hubungan antara upaya tangkap dan total tangkapan udang diketahui Tangkapan Lestari Maksimum (TLM) dan Upaya Tangkap Optimum (UTO) perikanan udang di WPP-NRI 718 berturut-turut adalah 49.500 ton per tahun dan 635 unit kapal pukat udang 130 GT (Purwanto, 2013).



## B EKOSISTEM

Perairan Indonesia terdiri dari tiga ekosistem besar, yaitu Paparan Sunda, Paparan Sahul dan laut dalam. Paparan Sahul dengan luas 160 ribu km<sup>2</sup> mencakup Laut Arafuru (143,5 ribu km<sup>2</sup>) dan perairan lainnya (16,5 ribu km<sup>2</sup>) (Bailey *et al.*, 1987). Laut Arafuru berada diantara Australia bagian utara dan pulau-pulau pada bagian timur Indonesia. Perairan ini berbatasan dengan Laut Banda pada sisi utara dan Laut Timor pada sisi barat; Selat Torres pada sisi timur menghubungkan perairan tersebut dengan Laut Coral. Pada sisi tenggara, Laut Arafuru berhubungan dengan Teluk Carpentaria. Laut Arafuru adalah perairan dangkal, dengan kedalaman hingga 80 meter, perairan semakin dalam ke arah barat.



© Frederick J. Weytmauser/WWF-Canon

Laut Arafuru merupakan salah satu daerah penangkapan udang dan ikan demersal yang paling produktif di Indonesia. Tingginya produktivitas Laut Arafuru, karena habitat udang dan ikan demersal tersebut secara tetap mengalami pengayaan unsur hara oleh proses upwelling dan masukan hara dari aliran sungai. Perairan tersebut juga didukung oleh tempat asuhan anakan udang dan ikan pada kawasan pantainya.

Sementara itu, massa air yang mengalir di sungai besar membawa unsur hara dari hutan lebat di pedalaman Papua ke Laut Arafuru selama musim penghujan. Unsur hara juga diangkut ke Laut Arafuru dari hutan mangrove yang lebat sepanjang pantai barat Papua (Sadhotomo *et al.*, 2003). Namun demikian, produktivitas primer yang tinggi di Laut Arafuru khususnya selama musim tenggara bukan karena aliran sungai melainkan pencampuran vertikal yang membawa air yang kaya unsur hara dari lapisan air laut yang lebih dalam (Wetsteyn *et al.*, 1990). Kawasan hutan bakau juga menyumbang kepada produktivitas daerah penangkapan ikan di Laut Arafuru melalui fungsinya sebagai tempat asuhan udang. Keterkaitan *post-larvae and juvenile* udang dengan hutan mangrove telah dilaporkan oleh sejumlah peneliti, antara lain Primavera (1997, 1998), dan Nagelkerken *et al.* (2008). Membandingkan sejumlah lokasi di Laut Arafuru dan Teluk Carpentaria, produktivitas primer pada pantai barat Papua adalah yang tertinggi.

Luas area di Laut Arafuru yang memungkinkan untuk pengoperasian kapal dengan sasaran utama udang penaeid lebih dari 70 ribu km<sup>2</sup>, dengan kedalaman air antara 10 – 50 meter (Naamin, 1984; Sadhotomo, Rahardjo and Wedjatmiko, 2003). Namun, operasi penangkapan dengan alat tangkap pukat udang terkonsentrasi pada perairan sepanjang pantai barat Papua, dan perairan sekitar Pulau Aru dan Dolak, sebagaimana terekam melalui fasilitas VMS.

## C PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumberdaya ikan di laut arafura (WPP-NRI 718), baik sebagai individu, kelompok atau organisasi. Oleh sebab itu, setiap pemangku kepentingan hendaknya dapat terlibat secara aktif dalam proses penyusunan dan pelaksanaan RPP-WPP-NRI 718 ini. Dalam hal ini pemangku kepentingan terdiri dari :

### Pemerintah

- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah
- TNI-AL dan POLAIRUD
- Kelompok Ilmiah/ *Scientific Group*
- Kementerian Terkait.

### Non Pemerintah

- Nelayan
- Penyedia/ *Suppliers*
- Industri Penangkapan/ *Fishing industry*
- Industri Pengolahan Ikan/ *Fish Processing Industry*
- Asosiasi Perusahaan/ *Company Associations*
- Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Swadaya Masyarakat
- Pemimpin Adat/ *Traditional Leader*
- Mitra Kerjasama/ *Collaborative Partners*.

## D SOSIAL DAN EKONOMI

Kondisi sosial dan ekonomi di wilayah perairan WPP-NRI 718 dijelaskan sebagai berikut:

- ▶ WPP-NRI 718 secara administratif terletak diantara Provinsi Maluku, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan laut ini yaitu Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Barat Daya, kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Mimika, dan Kab. Aru Kepulauan.
- ▶ Pemanfaat sumberdaya ikan yang ada di WPP-NRI 718 meliputi nelayan dan perusahaan yang ada di delapan kabupaten tersebut, disamping itu juga oleh perusahaan perikanan nasional dan perusahaan perikanan Penanaman Modal Asing (PMA) yang memperoleh izin beroperasi di perairan ini.
- ▶ Suatu isu yang perlu diangkat dalam upaya pengelolaan perikanan di wilayah ini, yaitu bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan di WPP-NRI 718 belum memberikan kontribusi yang nyata bagi penduduk lokal. Kemiskinan nelayan di wilayah Maluku dan Papua merupakan permasalahan berkepanjangan yang belum terselesaikan
- ▶ Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP-NRI 718, dengan karakteristik sosial-ekonomi dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan di wilayah ini.



## E TATAKELOLA

Kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari unit kerja Eselon I sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
- Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Perhubungan, di bidang penerbitan dokumen kapal;
- Kementerian Perdagangan, di bidang ketentuan perdagangan;
- Kementerian Kehutanan, di bidang konservasi
- Kementerian Pekerjaan Umum di bidang infrastruktur.
- Kementerian Luar Negeri, di bidang kerjasama perikanan dengan negara lain (bilateral dan multilateral) serta keanggotaan dalam organisasi regional dan internasional;
- Kepolisian Republik Indonesia dan TNI-Angkatan Laut di bidang Penegakan Hukum Perikanan; dan
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dibidang penelitian.
- Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab melakukan pengelolaan sumberdaya ikan di WPP-NRI 718 terdiri dari 3 (tiga) Pemerintah Provinsi (Papua, Papua Barat dan Maluku), serta 8 (delapan) Pemerintah Kab/Kota (Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Merauke, Mappi, Asmat, Mimika, dan Kepulauan Aru).

Selanjutnya, terdapat Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnas Kajiskan) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumberdaya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best scientific evidence available*), dalam penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Disamping itu, juga terdapat instansi terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan udang dan ikan demersal antara lain :

Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan, dilaksanakan pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional. Keanggotaan FKPPS terdiri dari unit kerja Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan (Komnas Kajiskan), Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Peneliti Perikanan, Akademisi dari berbagai perguruan tinggi termasuk Asosiasi Perikanan antara lain: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI), Asosiasi Pengusaha Non-Tuna dan Non-Udang (ASPINTU), termasuk pelaku usaha perikanan tangkap dan industri pengolahan ikan.

## ► BAB 03



### SATUAN PENGELOLAAN

# PERIKANAN

**S**atuan pengelolaan perikanan (*fisheries management unit*) adalah jenis/kelompok ikan yang dikelola dalam rencana pengelolaan perikanan di WPP-NRI 718. Proses penentuan satuan pengelolaan perikanan dilakukan melalui (i) identifikasi jenis ikan hasil tangkapan, (ii) analisis jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat tangkap, (iii) Analisis komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat tangkap. Berdasarkan analisis terhadap hal tersebut, maka untuk tahap awal, diusulkan satuan pengelolaan perikanan dalam RPP ini adalah udang dan ikan demersal.







## ► BAB 04



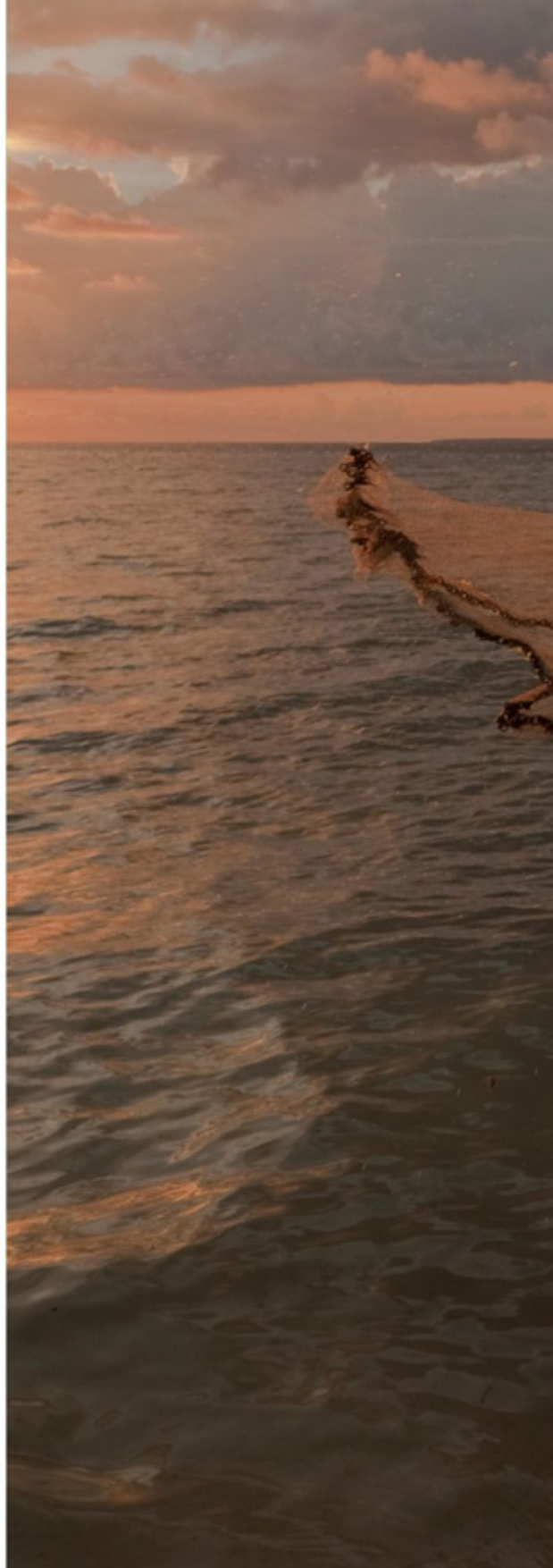
# ISU DAN PRIORITAS

## A ISU

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan praktek pengelolaan udang dan ikan demersal (*demersal finfish*) di WPP-NRI 718, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan (i) sumberdaya ikan dan lingkungan, (ii) sosial ekonomi dan (iii) tatakelola untuk perikanan udang dan ikan demersal. Berdasarkan inventarisasi tersebut, terdapat 13 (tiga belas) isu terkait dengan sumberdaya ikan dan lingkungannya, dan 11 isu terkait dengan sosial ekonomi serta 14 isu terkait dengan tatakelola. Selanjutnya ditetapkan masing-masing 5 (lima) isu prioritas yang akan dikelola dalam RPP ini.

## B ISU PRIORITAS

Isu prioritas ditetapkan dengan melakukan analisis terhadap masing-masing isu, dengan memberikan nilai skor 1-5 untuk setiap isu. Berdasarkan analisis tersebut, diusulkan 5 (lima) isu prioritas yang memiliki skor tertinggi sehingga dianggap sangat penting untuk dikelola, seperti pada **Tabel 4.1**.





**Tabel 4.1**  
Isu prioritas dalam perikanan udang dan ikan demersal

ISU	
<b>A</b>	<b>SUMBERDAYA IKAN DAN LINGKUNGAN</b>
1	Degradasi stok sumberdaya udang dan ikan demersal .
2	Keberlangsungan usaha penangkapan udang dan ikan demersal.
3	Tingkat pemanfaatan udang diduga <i>fully exploited</i> .
4	Tingkat pemanfaatan ikan demersal diduga <i>over-exploited</i> .
5	CPUE cenderung menurun setiap tahun.
<b>B</b>	<b>SOSIAL EKONOMI</b>
1	Awak kapal berukuran 30 GT keatas didominasi oleh tenaga kerja/ABK asing
2	Akurasi data armada penangkapan ikan SIPI Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 5 GT kebawah yang beroperasi di WPP-NRI 718.
3	Akurasi data jumlah nelayan Indonesia yang beroperasi di WPP-NRI 718 yang memanfaatkan udang dan ikan demersal.
4	Kemiskinan nelayan
5	Partisipasi pemangku kepentingan
<b>C</b>	<b>ISUTATA KELOLA</b>
1	Illegal fishing: penangkapan ikan tanpa izin.
2	<i>Unreported fishing: transshipment</i> di laut, pendaratan ikan diluar pelabuhan perikanan, dugaan pengangkutan ikan dari <i>fishing ground</i> langsung ke luar negeri
3	Lemahnya penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum
4	Belum adanya kebijakan pembatasan jumlah kapal dan jumlah alat tangkap di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5	Pengumpulan data hasil tangkapan/perikanan



Isu prioritas diatas merupakan dasar utama dalam menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rencana pengelolaan ini.



## ► BAB 05



# MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

## A MAKSUD

Rencana Pengelolaan Perikanan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor Bagian Timur (WPP-NRI 718) dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya *Blue-Economy* melalui Pembangunan Kelautan dan Perikanan di WPP-NRI 718 yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat, dengan 4 (empat) pendekatan yakni (i) pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), (ii) pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), (iii) penyediaan kesempatan kerja (*pro-job*) dan (iv) kelestarian lingkungan (*pro-environment*). Rencana Pengelolaan Perikanan WPP-NRI 718 sebagai acuan dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir guna mendukung program industrialisasi dan Minapolitan.

Pencapaian maksud tersebut diatas dilakukan melalui pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan perikanan di Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor Bagian Timur (WPP-NRI 718) dari 3 (tiga) perspektif yaitu:

1. Sumberdaya Ikan dan Lingkungan;
2. Sosial Ekonomi; dan
3. Tatakelola.





© Jürgen Freund / WWF-Canon

## B TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pengelolaan perikanan di WPP-NRI 718 ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu prioritas yang telah teridentifikasi, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *specific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu).

### TUJUAN 1

## SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN

“Sumberdaya ikan dan habitatnya dikelola secara berkelanjutan”



Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut diatas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

- ▶ Tercapainya rasionalisasi jumlah hari penangkapan udang dan ikan demersal dengan kondisi status stok dalam 3 tahun;
- ▶ Terjaganya keberlangsungan stok udang pemijah (*spawner*) sekitar 20% dari estimasi hasil tangkapan bulan Februari setiap tahun;
- ▶ Meningkatnya kepatuhan pemakaian BRD di perikanan udang sebanyak 25% dalam 3 tahun;
- ▶ Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan di 3 lokasi dalam *sharing* data dan informasi indikator biologi, lingkungan dan upaya dari perikanan udang dan ikan demersal di WPP-NRI 718 dalam 2 tahun.;
- ▶ Meningkatnya jumlah enumerator dan data analis untuk data ilmiah minimal 50 orang dalam 2 tahun;
- ▶ Berkurangnya laju kerusakan mangrove sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3 tahun;
- ▶ Berkurangnya laju kerusakan terumbu karang dan padang lamun sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3 tahun.



### Indikator Dan *Benchmark* Sasaran Untuk Mencapai Tujuan No. 1

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran diatas, ditetapkan indikator dan *benchmark* untuk setiap sasaran yang ingin dicapai seperti dibawah ini:

Indikator dan *Benchmark* Tujuan 1

No	Sasaran	Indikator	<i>Benchmark</i>
1	Tercapainya rasionalisasi jumlah hari penangkapan udang dan ikan demersal dengan kondisi status stok dalam 3 tahun.	Upaya penangkapan	Jumlah hari operasi tidak terbatas.
2	Terjaganya keberlangsungan stok udang pemijah ( <i>spawner</i> ) sekitar 20% dari estimasi hasil tangkapan bulan Februari setiap tahun.	Hasil tangkapan udang pada bulan Februari	Hasil tangkapan udang sekitar 381 ton pada bulan Februari setiap tahun
3	Meningkatnya kepatuhan pemakaian <i>Bycatch Reduction Device</i> (BRD) di perikanan udang sebanyak 25% dalam 3 tahun	Jumlah kapal pukat udang dan pukat ikan yang menggunakan BRD	Jumlah kapal yang menggunakan BRD dengan cara yang benar 10%.
4	Terwujudnya partisipasi stakeholder di 3 lokasi dalam <i>sharing</i> data dan informasi parameter indikator biologi, lingkungan dan effort dari perikanan udang dan ikan demersal di WPP-NRI 718 dalam 2 tahun.	Jumlah stakeholder terkait yang terlibat data sharing.	Jumlah stakeholder terkait yang terlibat dalam lokal working grup di 2 lokasi
5	Meningkatnya jumlah enumerator dan data analisis untuk data ilmiah minimal 50 orang dalam 2 tahun	Jumlah enumerator	Jumlah enumerator di 10 Kabupaten/Kota dan 3 provinsi sebanyak 13 orang.
6	Berkurangnya laju kerusakan mangrove sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3 tahun.	Luasan tutupan lahan mangrove	Laju kerusakan saat ini akan dikaji pada tahun 2014.
7	Berkurangnya laju kerusakan terumbu karang dan padang lamun sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3 tahun.	Luas Penutupan Terumbu Karang dan padang lamun	Laju kerusakan saat ini akan dikaji pada tahun 2014.



© Jürgen Freund / WWF-Canon

## TUJUAN 2 SOSIAL EKONOMI

**“Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan”**



Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut diatas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

- ▶ Menurunnya jumlah awak kapal warga negara asing pada kapal pukat ikan berukuran 30 GT ke atas menjadi 1.000 orang (hanya Nakhoda dan KKM) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.
- ▶ Revalidasi 100% data jumlah armada penangkapan udang dan ikan demersal, hasil tangkapan, jumlah nelayan dan pendapatannya untuk pelaksanaan pengelolaan perikanan yang lebih baik dalam kurun waktu 2 tahun.
- ▶ Meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan UMR di Provinsi Maluku, Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu 3 tahun.
- ▶ Meningkatnya utilitas unit pengolahan ikan menjadi minimal 80 % dalam waktu 2 (dua) tahun.

**Indikator Dan *Benchmark* Sasaran Untuk Mencapai Tujuan No. 2**

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran diatas, ditetapkan indikator dan *benchmark* untuk setiap sasaran yang ingin dicapai seperti dibawah ini:

Indikator dan *Benchmark* Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	<i>Benchmark</i>
1	Menurunnya jumlah awak kapal berwarganegara asing pada kapal pukat ikan berukuran 30 GT keatas menjadi 1.000 orang (hanya Nakhoda dan KKM) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.	Jumlah awak kapal berwarga negara asing pada kapal pukat ikan	Jumlah awak kapal warga negara asing pada kapal pukat ikan sekitar 13.000 orang.
2	Revalidasi 100% data jumlah armada penangkapan udang dan demersal <i>finfish</i> , hasil tangkapan, jumlah nelayan dan pendapatannya untuk pelaksanaan pengelolaan perikanan yang lebih baik dalam kurun waktu 2 tahun.	Data tentang jumlah armada, hasil tangkapan, jumlah nelayan dan pendapatannya.	1. Upah minimum regional. 2. Data jumlah armada, hasil tangkapan dan jumlah nelayan dalam Statistik perikanan tangkap
3	Meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan UMR di Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat dalam kurun waktu 3 tahun.	1. Pendapatan Nelayan  2. Kualitas ikan	1. Data pendapatan nelayan diperoleh dari sasaran nomor (2). 2. Data Kualitas ikan dikaji pada tahun pertama.
4	Meningkatnya utilitas unit pengolahan ikan menjadi minimal 80 % dalam waktu 2 (dua) tahun	Utilisasi UPI	Tingkat utilisasi UPI di WPP-NRI 718 sekitar 38%

### TUJUAN 3

## TATAKELOLA

"Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing*"



Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut diatas, ditentukan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut:

- ▶ Terbentuknya kelembagaan pengelolaan WPP NRI 718 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
- ▶ Menurunnya jumlah kapal ilegal (termasuk kapal <30GT) sebanyak 30% dalam kurun waktu 4 tahun;
- ▶ Pemberantasan pengoperasian *pair trawl* tanpa SIPI dan/atau yang menggunakan SIPI pukat ikan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
- ▶ Menurunnya indikasi kegiatan *transshipment illegal* sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun;
- ▶ Menurunnya indikasi kegiatan penangkapan ilegal di perairan teritorial oleh kapal berukuran >30GT sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun;
- ▶ Meningkatnya jumlah transmitter yang terpasang pada 100% kapal perikanan (1.012 kapal) di tahun 2014;
- ▶ Meningkatnya jumlah hari patroli menjadi 180 hari patroli per kapal per tahun di tahun 2015;
- ▶ Meningkatnya partisipasi aktif instansi terkait dalam operasi gabungan memberantas *IUU fishing* sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;
- ▶ Meningkatnya pertemuan koordinasi dengan industri perikanan dan masyarakat dalam pemberantasan *IUU fishing* menjadi 2 (dua) kali dalam setahun.
- ▶ Tercapainya distribusi *fishing effort* yang optimal dalam perizinan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam waktu 2 (dua) tahun.

### Indikator Dan *Benchmark* Sasaran Untuk Mencapai Tujuan No. 2

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran diatas, ditetapkan indikator dan *benchmark* untuk setiap sasaran yang ingin dicapai seperti dibawah ini:

#### Indikator dan *Benchmark* Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	<i>Benchmark</i>
1	Terbentuknya kelembagaan pengelolaan WPP-NRI 718 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun	Kelembagaan pengelolaan WPP-NRI 718	Belum terdapat kelembagaan pengelolaan WPP-NRI 718
2	Menurunnya jumlah kapal ilegal (termasuk kapal <30GT) sebanyak 30% dalam kurun waktu 4 tahun.	Jumlah kapal ilegal	101 kapal yang ditangkap dan di- <i>ad hoc</i> pada tahun 2012.
3	Pemberantasan pengoperasian <i>pair trawl</i> tanpa SIPI dan/atau yang menggunakan SIPI pukat ikan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun	Jumlah kapal <i>pair trawl</i> yang beroperasi	Hasil <i>air surveillance</i> DJPSDKP November 2013
4	Menurunnya indikasi kegiatan <i>transshipment</i> ilegal sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun	Jumlah <i>transshipment</i> ilegal	23 indikasi kasus <i>transshipment</i> ilegal pada tahun 2012
5	Menurunnya indikasi kegiatan penangkapan ilegal di perairan teritorial oleh kapal berukuran >30GT sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun	Jumlah kapal perikanan berukuran >30GT yang menangkap ikan di perairan teritorial.	47 kapal >30 GT yang terindikasi menangkap ikan di perairan teritorial pada tahun 2012
6	Meningkatnya jumlah <i>transmitter</i> yang terpasang pada kapal perikanan sebanyak 1012 kapal.	Jumlah <i>transmitter</i>	803 VMS terpasang
7	Meningkatnya jumlah hari patroli menjadi 180 hari patroli/kapal/tahun di tahun 2015.	Jumlah hari patroli	115 hari patroli/kapal/tahun
8	Meningkatnya partisipasi aktif instansi terkait dalam operasi gabungan memberantas <i>IUU fishing</i> sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun	Jumlah operasi gabungan	Operasi gabungan 1 tahun sekali
9	Meningkatnya pertemuan koordinasi dengan industri perikanan dan masyarakat dalam pemberantasan <i>IUU fishing</i> menjadi 2 (dua) kali dalam setahun .	Jumlah pertemuan koordinasi	Pertemuan koordinasi 1 kali dalam 3 tahun
10	Tercapainya distribusi <i>fishing effort</i> yang optimal dalam perizinan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam waktu 2 (dua) tahun.	Data SIPI di tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten.	Belum terdapat integrasi data SIPI Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

## RENCANA AKSI

# PENGELOLAAN

**R**encana aksi disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), *how* (cara melakukan kegiatan) dan *budgeting* (alokasi dana).



© naturepl.com/Tim Laman / WWF

## A RENCANA AKSI TUJUAN I:

“SUMBERDAYA IKAN DAN HABITATNYA DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
A	Sasaran No. 1 Tercapainya rasionalisasi jumlah hari penangkapan udang dan ikan demersal dengan kondisi status stok dalam 3 tahun.		
1		DJPT dan Balitbang KP melakukan kajian jumlah hari operasi penangkapan dan jumlah armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar ijin pusat di WPP-NRI 718.	2014
2		Dirjen PT menetapkan jumlah hari operasi dan jumlah armada optimal untuk armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar ijin pusat di WPP-NRI 718.	2015
3		DJPT melakukan sosialisasi ketentuan tentang jumlah hari operasi dan jumlah armada optimal untuk armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar ijin pusat di WPP-NRI 718	2015
4		DJPT mengurangi jumlah hari operasi penangkapan setara jumlah hari operasi optimal (melalui mekanisme penerbitan SPB) untuk armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar ijin pusat di WPP-NRI 718.	2015-2017
5		DJPT atas rekomendasi BalitbangKP melakukan pengaturan musim penangkapan untuk armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar ijin pusat pada saat periode pemijahan ( <i>spawning season</i> ) di WPP-NRI 718.	2016-2017
B	Sasaran No. 2 Terjaganya keberlangsungan stok udang pemijah ( <i>spawner</i> ) sekitar 20% dari estimasi hasil tangkapan bulan Februari setiap tahun.		
1		Badan Litbang KP merekomendasikan tindakan penutupan musim penangkapan udang bagi kapal perikanan ijin pusat di WPP-NRI 718 kepada Ditjen Perikanan Tangkap	2014
2		Ditjen Perikanan Tangkap mengusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengambil kebijakan penutupan musim penangkapan udang bagi kapal perikanan ijin pusat di WPP-NRI 718	2014
3		Ditjen Perikanan Tangkap menerapkan kebijakan penutupan musim penangkapan udang bagi kapal perikanan ijin pusat di WPP-NRI 718 melalui mekanisme penerbitan SPB	2014-2015

No	Sasaran	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
C	Sasaran No. 3 Meningkatnya kepatuhan pemakaian <i>Bycatch Reduction Device</i> (BRD) di perikanan udang sebanyak 25% dalam 3 tahun.		
1		DJPSDKP menerapkan sanksi bagi kapal pukat udang yang tidak menggunakan BRD secara benar di WPP-NRI 718	2014
2		DJPT dan BalitbangKP menambah tugas pemantau di atas kapal untuk memonitor penggunaan BRD pada pukat udang di WPP-NRI 718.	2014
D	Sasaran No. 4 Terwujudnya partisipasi <i>stakeholder</i> di 3 lokasi dalam sharing data dan informasi parameter indikator biologi, lingkungan dan <i>effort</i> dari perikanan udang dan ikan demersal di WPP-NRI 718 dalam 2 tahun.		
1		DJPT melakukan revitalisasi pelaksanaan program logbook penangkapan ikan untuk kapal pukat ikan, pukat udang dan rawai dasar ijin pusat di WPP-NRI 718.	2014-2015
2		DJPT melakukan revitalisasi pelaksanaan program <i>observer on-board</i> pada 10% per-tahun untuk masing-masing armada pukat udang dan pancing rawai dasar ijin pusat di WPP-NRI 718.	2014-2015
3		DJPT memobilisasi petugas pemantau di atas kapal ( <i>observer onboard</i> ) pada kapal pukat ikan	2014-2015
E	Sasaran No. 5 Meningkatnya jumlah enumerator dan <i>data analyst</i> untuk data ilmiah minimal 50 orang serta <i>observer onboard</i> minimal 200 orang dalam 2 tahun		
1		BPSDMKP, DJPT dan BALITBANG KP melakukan pelatihan enumerator dan <i>data analyst</i> untuk armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar ijin pusat di WPP-NRI 718 sebanyak 25 orang per tahun	2014-2015
2		BPSDMKP, DJPT dan BALITBANG KP melakukan pelatihan <i>observer onboard</i> untuk armada pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar ijin pusat di WPP-NRI 718 sebanyak 100 orang per tahun	2014-2015



No	Sasaran	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
F	Sasaran No. 6 Berkurangnya laju kerusakan mangrove sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3 tahun.		
1		DJKP3K dan BalitbangKP melakukan kajian tentang status dan penyebab kerusakan mangrove di WPP NRI-718	2014
2		BPSDMKP dan DJKP3K melakukan kampanye penyadaran masyarakat terkait kelestarian ekosistem mangrove di WPP NRI-718	2014-2016
3		DJPSPDKP melakukan kerjasama dengan Ditjen KP3K dan PEMDA untuk melakukan pengawasan mangrove di WPP NRI-718	2015-2016
4		DJKP3K dan Pemda melakukan rehabilitasi mangrove yang telah rusak di WPP NRI-718.	2015-2016
G	Sasaran No. 7 Berkurangnya laju kerusakan terumbu karang dan padang lamun sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam 3 tahun.		
1		DJKP3K dan Balitbang KP mengevaluasi status dan penyebab degradasi terumbu karang dan padang lamun di WPP NRI-718	2014
2		BPSDMKP dan Ditjen KP3K melakukan kampanye penyadaran masyarakat terkait kelestarian ekosistem terumbu karang dan padang lamun di WPP NRI-718.	2014-2016
3		DJPSPDKP melakukan pengawasan ekosistem terumbu karang dan padang lamun di WPP NRI-718	2014-2016
4		DJKP3K berkoordinasi LIPI, PEMDA melakukan upaya konservasi kawasan, rehabilitasi terumbu karang dan padang lamun di WPP NRI-718.	2015-2016
5		DJKP3K dan Pemda meningkatkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan yang ada di WPP NRI-718.	2014-2016
6		Balitbang KP melakukan evaluasi dan analisis sebagai bahan rekomendasi calon kawasan konservasi di WPP-NRI 718.	2014
7		DJKP3K memfasilitasi PEMDA membentuk kawasan konservasi perairan daerah yang baru di WPP NRI 718.	2015-2016

## B RENCANA AKSI TUJUAN 2:

"MENINGKATNYA MANFAAT EKONOMI DARI PERIKANAN BERKELANJUTAN UNTUK MENJAMIN KESEMPATAN KERJA DAN PENGURANGAN KEMISKINAN"

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
A	Sasaran No. 1	Menurunnya jumlah awak kapal berwarganegara asing pada kapal pukat ikan berukuran 30 GT keatas menjadi 1.000 orang (hanya Nakhoda dan KKM) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.	
1		Kementerian Kelautan dan Perikanan menegakan pelaksanaan Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	2014-2015
2		Ditjen Perikanan Tangkap tidak menerbitkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) untuk kapal yang diawaki oleh orang asing.	2014-2015
3		Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melakukan inspeksi secara teratur terhadap kapal pukat ikan untuk memastikan bahwa kapal tersebut diawaki oleh orang Indonesia.	2014-2015
4		Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan melakukan pelatihan untuk nelayan lokal termasuk para lulusan SUPM dan Akademi Perikanan Sorong agar mampu bekerja di kapal pukat ikan.	2014-2015
B	Sasaran No.2	Revalidasi 100% data jumlah armada penangkapan udang dan ikan demersal, hasil tangkapan , jumlah nelayan dan pendapatannya untuk pelaksanaan pengelolaan perikanan yang lebih baik dalam kurun waktu 2 tahun.	
1		Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan <i>survey study</i> tentang jumlah armada, hasil tangkapan, jumlah nelayan udang dan ikan demersal di WPP-NRI 718. Alokasi waktu survei direkomendasikan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan : 6 bulan</li> <li>• Pengumpulan Data : 12 bulan</li> <li>• Analisa Data : 3 bulan</li> <li>• Pelaporan : 3 bulan</li> </ul>	2014- 2015
		Catatan: Survei data hasil tangkapan diintegrasikan dengan rencana aksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.	
2		Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi, Balitbang KP melaksanakan <i>survey study</i> tentang jumlah pendapatan nelayan udang dan ikan demersal di WPP-NRI 718. Alokasi waktu survei direkomendasikan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan: 6 bulan</li> <li>• Pengumpulan data : 12 bulan</li> <li>• Analisa data: 3 bulan</li> <li>• Pelaporan : 3 bulan</li> </ul>	2014-2015

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
	Meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan UMR di Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat dalam kurun waktu 3 tahun.		
1		<p>Ditjen Perikanan Tangkap dan Pemerintah Daerah sesuai tanggungjawabnya masing-masing, melaksanakan peningkatan fasilitas pendaratan ikan pada 6 (enam) lokasi pendaratan ikan di Provinsi Maluku, 1 (satu) lokasi di Provinsi Papua dan 1 (satu) di Papua Barat. Alokasi waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut direkomendasikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi fasilitas yang tersedia dan <i>assessment</i> fasilitas yang dibutuhkan : 6 bulan</li> <li>• Rekomendasi kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas pendaratan ikan.</li> <li>• Pelaksanaan rekomendasi untuk setiap lokasi pendaratan ikan : 24 bulan</li> <li>• Anggaran berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.</li> </ul>	2014-2016
2		BPSDMKP dan Ditjen P2HP melaksanakan pelatihan tersertifikasi tentang penanganan ikan bagi nelayan, pedagang ikan, perantara ( <i>middle man</i> ) atau pengolah ikan untuk meningkatkan jumlah ikan yang berkualitas baik dan keamanan pangan, pada 6 (enam) lokasi pendaratan ikan di Provinsi Maluku, 1 (satu) lokasi pendaratan ikan di Provinsi Papua dan 1 (satu) lokasi di Provinsi Papua Barat.	2014-2016
3		Ditjen Perikanan Tangkap dan Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kepedulian ( <i>awareness building program</i> ) secara berkelanjutan, bagi nelayan dan petugas di lokasi pendaratan ikan agar melakukan penanganan ikan yang lebih baik untuk mempertahankan mutu ikan dan keamanan pangan pada 6 (enam) lokasi pendaratan ikan di Provinsi Maluku, 1 (satu) lokasi pendaratan ikan di Papua dan 1 (satu) lokasi pendaratan ikan di Provinsi Papua Barat.	2014-2016
4		Ditjen P2HP melaksanakan study pasar ( <i>market survey</i> ) mencari pasar baru ( <i>new market</i> ) untuk udang dan ikan demersal baik di pasar lokal, regional, nasional dan internasional (ekspor).	2015
D	Sasaran no. 4		
	Meningkatnya utilitas unit pengolahan ikan menjadi minimal 80 % dalam waktu 2 (dua) tahun		
1		Ditjen P2HP meningkatkan kemitraan usaha antara UPI dengan perusahaan penangkapan ikan.	2014-2015

### C RENCANA AKSI TUJUAN 3:

"MENINGKATNYA PARTISIPASI AKTIF DAN KEPATUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA MEMBERANTAS KEGIATAN IUU FISHING"

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
A	Sasaran No. 1 Terbentuknya kelembagaan pengelolaan WPP-NRI 718 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun		
1		DJPT membentuk kelembagaan pengelolaan WPP-NRI 718 yang bersifat <i>Adhoc</i>	2014
2		Setjen KKP mengusulkan pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP-NRI 718 kepada KEMENPAN RB	2015
B	Sasaran No.2 Menurunnya jumlah kapal <i>illegal</i> (termasuk kapal <30GT) sebanyak 30% dalam kurun waktu 4 tahun.		
1		Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) meningkatkan verifikasi dokumen persyaratan dalam penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk alat tangkap pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar di WPP RI 718	2014-2017
2		Direktorat Jenderal PSDKP meningkatkan jumlah hari patrol untuk mengawasi <i>illegal fishing</i> yang dilakukan kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar di WPP RI 718	2014-2017
3		Ditjen PSDKP melakukan pengawasan menggunakan teknologi <i>night light</i> dan satelit dengan memanfaatkan satelit NOAA	2014-2017
4		Ditjen PSDKP meningkatkan kerjasama bilateral dan/atau regional dalam memberantas <i>IUU fishing</i> yang dilakukan untuk kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar di WPP NRI 718 (joint patrol)	2014-2017
5		Ditjen PSDKP melaksanakan <i>public campaign</i> untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka mengurangi <i>IUU fishing</i> yang dilakukan kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar di WPP NRI- 718	2014-2017
C	Sasaran No. 3 Pemberantasan pengoperasian <i>pair trawl</i> tanpa SIPI dan/atau yang menggunakan SIPI pukat ikan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun		
1		Direktorat Jenderal PSDKP meningkatkan pengawasan terhadap kapal <i>Pair Trawl</i> dan Kapal Pukat Ikan yang terindikasi mengoperasikan <i>Pair Trawl</i> di WPP-NRI 718	2014-2015
2		DJPT memasukan perusahaan dan/atau perorangan yang terbukti dan/atau patut diduga mengoperasikan <i>Pair Trawl</i> dalam daftar hitam ( <i>black list</i> ) sistem perizinan.	2014-2015

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
D	Sasaran No. 4	Menurunnya indikasi kegiatan <i>transshipment</i> ilegal sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun.	
1		Direktorat Jenderal PSDKP meningkatkan pengawasan terhadap kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar melalui kapal pengawas dan rekaman VMS di WPP NRI-718	2014-2017
2		Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) meningkatkan fungsi pengawasan di Pelabuhan Perikanan yang berada di sekitar WPP NRI-718 terhadap kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar yang beroperasi di WPP NRI-718 melalui pemeriksaan logbook	2014-2017
3		Direktorat Jenderal PSDKP melakukan tindakan preventif melalui pengawasan <i>tracking</i> VMS dan melakukan klarifikasi terhadap indikasi <i>transshipment</i> di WPP NRI-718 yang dilakukan kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar melalui data rekaman <i>tracking</i> VMS	2014-2017
E	Sasaran No. 5	Menurunnya indikasi kegiatan penangkapan ilegal di perairan territorial WPP NRI-718 oleh kapal berukuran >30 GT sebesar 30% dalam kurun waktu 4 tahun.	
1		Direktorat Jenderal PSDKP melakukan tindakan preventif melalui pengawasan <i>tracking</i> VMS dan melakukan klarifikasi terhadap indikasi <i>transshipment</i> di WPP NRI-718 yang dilakukan kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar melalui data rekaman <i>tracking</i> VMS	2014-2017
2		Ditjen PSDKP meningkatkan peran aktif Pokmaswas dalam pengawasan terhadap kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar di wilayah territorial WPP NRI-718.	2014-2017
3		Ditjen PSDKP meningkatkan peran aktif instansi terkait (Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam rangka pengawasan terhadap kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar di wilayah territorial WPP NRI-718	2014-2017

No	Sasaran	Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
F	Sasaran No. 6 Meningkatnya jumlah <i>transmitter</i> yang terpasang pada 100% kapal perikanan (1.012 kapal) di tahun 2014		
1		Ditjen PSDKP melakukan sosialisasi kepatuhan penggunaan <i>transmitter</i> kepada pelaku usaha kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar yang beroperasi di WPP NRI-718	2014-2017
2		Ditjen PSDKP melakukan penegakan hukum terhadap kapal pukat udang, pukat ikan dan pancing rawai dasar yang melakukan <i>IUU fishing</i> di WPP NRI-718	2014-2017
G	Sasaran No.7 Meningkatnya jumlah hari patroli di WPP NRI-718 menjadi 180 hari patroli/kapal/tahun di tahun 2015.		
1		Ditjen PSDKP meningkatkan alokasi anggaran BBM untuk kapal pengawas yang beroperasi di WPP NRI-718	2014-2017
H	Sasaran No. 8 Meningkatnya partisipasi aktif instansi terkait dalam operasi gabungan memberantas <i>IUU fishing</i> yang dilakukan menjadi 2 (dua) kali dalam setahun.		
1		Ditjen PSDKP meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi gabungan di WPP NRI-718	2014-2017
2		Ditjen PSDKP meningkatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan operasi gabungan dan koordinasi dengan instansi lain di WPP NRI-718	2014-2017
I	Sasaran No.9 Meningkatnya pertemuan koordinasi dengan industri perikanan dan masyarakat dalam pemberantasan <i>IUU fishing</i> yang dilakukan menjadi 2 (dua) kali dalam setahun.		
1		Ditjen PSDKP dan Ditjen Perikanan Tangkap meningkatkan koordinasi dengan industri perikanan dan masyarakat di WPP NRI-718	2014-2017
2		Ditjen PSDKP meningkatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan koordinasi dengan industri perikanan dan masyarakat di WPP NRI-718	2014-2017
J	Sasaran No. 10 Tercapainya distribusi fishing effort yang optimal dalam perizinan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam waktu 2 (dua) tahun.		
		DJPT dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan WPP-NRI 718 meningkatkan anggaran untuk membangun sistem data-base yang terintegrasi berbasis pelabuhan perikanan.	2014-2015

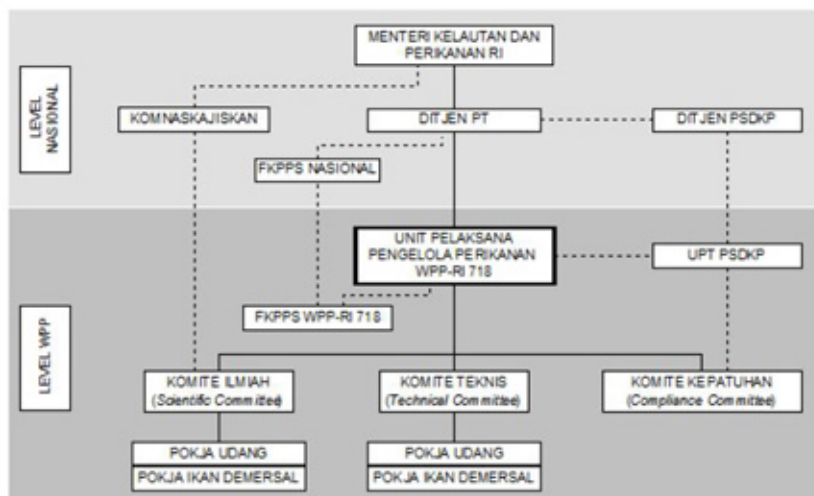


## KERANGKA KELEMBAGAAN

**K**erangka kelembagaan pelaksana rencana pengelolaan perikanan di WPP-NRI 718 dibentuk dengan pendekatan partisipasi unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga kepentingan pemangku kepentingan khususnya pelaku usaha penangkapan dapat diakomodir dengan tetap mengedepankan kepentingan kelestarian sumberdaya ikan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha penangkapan ikan tersebut.

Dengan penerapan pendekatan partisipatif tersebut, maka salah satu opsi kelembagaan pengelola WPP-NRI 718 seperti ditampilkan pada **Gambar 7.1** dibawah ini:

Selanjutnya untuk kepentingan koordinasi, dilakukan pertemuan FKPPS tingkat WPP-NRI 718 setiap tahun. FKPPS dipimpin oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan anggota terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait, perwakilan tokoh masyarakat nelayan, pelaku usaha, asosiasi, para pakar serta unsur terkait lainnya. Dalam pertemuan FKPPS, setiap komisi wajib menyampaikan hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi.



**Gambar 7.1**  
Kelembagaan Pengelolaan WPP-NRI 718





© David Stuart Melville / WWF-Canon















Direktorat Sumberdaya Ikan  
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Kementerian Kelautan dan Perikanan